



**PIDATO**  
**Dr. (H.C) PUAN MAHARANI**  
**KETUA DPR RI**

**PEMBUKAAN**  
**MASA SIDANG**

**Jakarta, 15 Agustus 2025**

Assalamualaikum Warahmatulahi  
Wabarakatuh,  
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,  
Om Swasti Astu,  
Namo Budaya,  
Salam Kebajikan,

Yang saya hormati,

1. Presiden Republik Indonesia, Bapak H. Prabowo Subianto,
2. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Ananda Putri,

3. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Ahmad Muzani, dan para wakil ketua MPR RI,
4. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Sultan Bachtiar Najamudin, dan para wakil ketua DPD RI,
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Dr. Ir. Isma Yatun, C.S.F.A., C.Fr.A., dan wakil ketua BPK RI serta Anggota BPK RI,

6. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,
7. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Dr. Suhartoyo, S.H, M.H.,
8. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D.,
9. Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- **Para Ketua Umum Partai Politik:**
  1. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Dr. Bahlil Lahadalia,
  2. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak H. Prabowo Subianto,
  3. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Bapak Dr. Drs. H. Surya Dharma Paloh,
  4. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.,

5. Ketua Umum Partai Demokrat,  
Bapak H. Agus Harimurti  
Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.,
6. Presiden Partai Keadilan  
Sejahtera, Bapak Dr. H. Al  
Muzzammil Yusuf, M.Si.,
7. Ketua Umum Partai Amanat  
Nasional, Bapak Dr. H. Zulkifli  
Hasan, S.E., M.M.,

- **Para Anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI,**
- **Para Menteri Kabinet Merah Putih,**
- **Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung,**
- **Para perwakilan teladan dari seluruh Indonesia,**
- **Para insan pers, media cetak dan elektronik,**
- **Para undangan yang berbahagia, serta seluruh Rakyat Indonesia yang kami muliakan.**

**Saudara Presiden dan Saudara Wakil  
Presiden,**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT,  
Tuhan Yang Maha Esa, atas segala  
rahmat dan anugerah-Nya, pada siang  
hari ini kita dapat melaksanakan tugas  
konstitusional pada Rapat Paripurna  
DPR RI dalam rangka Pembukaan  
Masa Persidangan I Tahun Sidang  
2025—2026.

Rapat Paripurna DPR RI pada siang hari ini memiliki dua agenda:

- pertama, Pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025—2026;
- kedua, Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 Beserta Nota Keuangannya.

**Saudara Presiden dan Saudara Wakil  
Presiden,**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Pembukaan masa sidang ini menandai dimulainya **tahun kedua masa bakti DPR RI** Periode 2024–2029.

Sepanjang masa sidang tahun pertama, kita dihadapkan pada persoalan-persoalan mendasar dan tantangan strategis yang akan menentukan arah dan kualitas pembangunan Indonesia ke depan.

Permasalahan dan tantangan yang harus kita selesaikan bukanlah pekerjaan administratif, melainkan **pekerjaan rumah yang menyangkut hal-hal paling mendasar dalam kehidupan bernegara**: keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan penguatan kedaulatan nasional.

Setiap pemerintahan akan membawa pendekatan yang berbeda —dengan **cara pikir, cara kerja, dan cara memimpin yang berbeda**. Perbedaan itu adalah suatu kebutuhan; situasi dan kondisi bangsa dan negara juga berubah, sehingga pendekatan pembangunan harus menjawab realitas zamannya.

Satu hal yang tidak boleh berubah adalah: tujuan akhirnya, yaitu **rakyat harus hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat.**

Apa pun gaya kepemimpinannya, yang dinilai adalah hasil nyata bagi rakyat.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMN bukan sekadar formalitas perencanaan, tetapi merupakan **terjemahan strategis dan teknokratis dari visi-misi Presiden yang terangkum dalam Asta Cita.**

Dokumen ini menjadi kompas pembangunan nasional bagi seluruh kementerian/lembaga; oleh karena itu: **tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden.**

Pembangunan bukanlah proses yang instan; Tidak semua hasil pembangunan dapat dirasakan seketika. **Pembangunan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesinambungan kebijakan.**

Kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, sebesar apa pun tampaknya hari ini baik, akan tetapi dapat berisiko menjadi beban negara di masa depan.

Oleh karena itu, DPR RI bersama Pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara — baik dalam politik hukum, politik pertahanan, politik pembangunan, maupun politik anggaran — dirumuskan secara cermat, dengan **mempertimbangkan secara menyeluruh manfaat dan risiko, baik jangka pendek maupun jangka panjang.**

Setiap kebijakan harus berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kepentingan sektoral atau kepentingan jangka pendek.

Masa sidang tahun kedua ini merupakan momentum strategis bagi **DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan penguatan arah kebijakan negara secara menyeluruh.**

Rakyat menaruh harapan besar, bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, **arah kebijakan nasional akan semakin berpihak kepada kehidupan rakyat.**

Dalam mewujudkan harapan tersebut, DPR RI melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, akan menjalankan perannya **sebagai mitra konstitusional Pemerintah** dalam menyukseskan Pembangunan Nasional.

DPR RI akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku, berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

**Saudara Presiden dan Saudara Wakil  
Presiden,**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR RI bersama Pemerintah, memiliki tanggung jawab bersama dalam membentuk UU untuk memenuhi kebutuhan legislasi nasional.

Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan **kinerja pembentukan undang-undang** pada tahun pertama keanggotaan DPR RI periode 2024-2029.

Hingga saat ini, DPR RI bersama dengan Pemerintah **telah menyelesaikan pembahasan 14 (empat belas) Rancangan Undang-Undang (RUU)**, yaitu:

- Komisi 1 = 1 UU
- Komisi 2 = 10 UU
- Komisi 6 = 1 UU
- Baleg = 2 UU

Sedangkan Komisi yang lain masih dalam tahapan pembentukan dan pembahasan RUU.

Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan memfokuskan **pembahasan terhadap 11 (sebelas) RUU** yang masih berada pada tahap **Pembicaraan Tingkat I**.

**DPR RI akan selalu memprioritaskan pembentukan UU yang berkualitas; sehingga lebih mengejar kinerja kualitas daripada kuantitas.**

Dalam pembentukan UU, DPR RI dan Pemerintah sering berada pada posisi **di tengah-tengah berbagai subjek hukum yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda** — seperti antara majikan dan pekerja, pengusaha dan konsumen, aparatur dan rakyat, penyedia jasa dan pengguna, serta berbagai relasi sosial lainnya.

Seperti menjadi wasit di tengah pertandingan olahraga: semua pihak merasa benar, dan kalau ada peluit dibunyikan, yang protes juga akan banyak; belum lagi pengamat-pengamat yang memberi komentar pro dan kontra.

**Tapi begitulah demokrasi: ramai, penuh aspirasi, dan harus sabar mendengar sebelum menyetok palu.**

Tanggung jawab utama pembentuk undang-undang adalah **bersikap adil dan bijaksana** dalam merumuskan norma hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut.

Konstitusi menghendaki agar hukum dapat menjadi **instrumen keadilan bagi seluruh warga negara.**

Untuk itulah, dalam setiap proses pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) merupakan syarat yang sangat penting. **Partisipasi ini adalah wujud kedaulatan rakyat.**

Dengan mendengar, menimbang, dan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat, produk hukum yang dihasilkan akan **memiliki legitimasi, keadilan, dan penerimaan publik yang lebih kuat.**

**Saudara Presiden dan Saudara Wakil  
Presiden,**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Fungsi pengawasan DPR RI, diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menangani urusan rakyat dan dalam menjalankan UU.

DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain:

1. penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dormant oleh PPATK;

2. rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara;
3. pelaksanaan program Sekolah Rakyat;
4. evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis;
5. tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga dan di daerah;
6. rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi 5 tahun;

7. perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia sebagai bagian kesepakatan tarif dagang;
8. Pelaksanaan Putusan MK tentang pendidikan gratis SD dan SMP.
9. sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
10. Pelaksanaan royalti hak cipta lagu

Masih banyak persoalan rakyat yang disampaikan langsung kepada DPR RI, baik melalui aspirasi daerah pemilihan, pengaduan publik, maupun forum-forum resmi yang disediakan oleh DPR.

Harapan rakyat jelas: agar setiap masalah yang mereka hadapi mendapat perhatian dan dapat segera terselesaikan melalui kebijakan negara yang responsif.

Sepanjang satu tahun terakhir, DPR RI telah menerima **laporan dan pengaduan masyarakat yang jumlahnya mencapai: 5.642 laporan;**

Kalau dibagi rata-rata perhari: terdapat 15-16 Laporan Pengaduan Masyarakat yang dimohonkan untuk dapat dibantu penyelesaiannya.

Setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI, dengan **rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah secara cepat dan tepat;**

Tindak lanjut rekomendasi tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari **komitmen konstitusional dalam hubungan kemitraan kekuasaan yang sejajar antara lembaga legislatif dan eksekutif.**

Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa DPR RI — melalui alat kelengkapan dewan, komisi-komisi, dan badan-badan yang ada — menjalankan **tugas pengawasan secara konstitusional, objektif, kritis, dan bertanggung jawab.**

Maka, apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI; sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Asta Cita dapat terlaksana dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Hal itu menjadi bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat dalam demokrasi, serta **pertanggung jawaban kami, DPR RI, kepada rakyat.**

Fungsi pengawasan DPR RI itu bukan semata rutinitas, melainkan bagian dari komitmen konstitusional;

Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri.

Bahkan kadang, sudah diingatkan pun masih butuh ditepuk pundaknya, agar selalu mawas diri, selalu berada di koridor jalan kebijakan Presiden, dan mensukseskan pelaksanaan visi misi Bapak Presiden dalam membangun bangsa dan negara.

DPR RI juga turut menjalankan peran diplomasi parlemen sebagai bagian dari upaya untuk **memperkuat pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia.**

Melalui instrumen diplomasi parlemen, DPR RI membangun komunikasi strategis dan kerja sama yang konstruktif dengan berbagai parlemen di dunia.

Peran ini sekaligus menegaskan posisi strategis DPR RI, yang tidak hanya bertindak sebagai representasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negeri, tetapi juga sebagai **wakil rakyat Indonesia dalam forum-forum global.**

Dalam situasi kondisi global yang tidak menentu maka dibutuhkan sinergi eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kancah internasional.

**Saudara Presiden dan Saudara Wakil  
Presiden,**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Agenda ke-2 (dua) pada sidang hari ini adalah Pidato Presiden RI dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 Beserta Nota Keuangannya.

Dampak dari pusaran kondisi dan situasi global yang tidak menentu adalah pada gerak perekonomian global yang melambat, distribusi komoditas strategis juga terganggu, dan rantai pasok industri juga dapat terpengaruh; yang pada akhirnya ikut mempengaruhi kondisi moneter, fiskal, sektor riil nasional, dan pendapatan masyarakat di Indonesia.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 diharapkan telah **mempertimbangkan berbagai faktor global tersebut dalam kebijakan fiskal tahun 2026.**

APBN sebagai instrumen yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang daya beli masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dan menjalankan pembangunan di segala bidang; selalu memiliki ruang fiskal yang terbatas.

Kebutuhan Belanja Negara untuk pembangunan akan selalu lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pendapatan negara; oleh karena itu dalam **keterbatasan ruang fiskal dan ruang defisit yang ketat**, maka Pemerintah harus dapat menetapkan **prioritas belanja**, serta menjalankan **kebijakan belanja yang efektif dan efisien**.

Selama 1 tahun terakhir, Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengkonsolidasikan program kementerian/lembaga termasuk melakukan efisiensi anggaran kementerian/lembaga;

Bapak Presiden Yang Terhormat, Mengenai efisiensi belanja tahun 2025, Kementerian/Lembaga curhatnya ke komisi-komisi yang menjadi mitra kerjanya; curhat masalah “cinta segitiga”: program prioritas, tambahan anggaran dan kebijakan efisiensi.

Namun cinta segitiga itu tidak harus berakhir dengan patah hati, karena semua pihak dapat saling memahami kepentingannya dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Upaya Pemerintah menjalankan efisiensi sejalan dengan amanat UU Keuangan Negara yang mengharuskan **APBN dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, memenuhi rasa keadilan dan rasa kepatutan.**

Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun Anggaran 2026; **Kesepakatan-kesepakatan tersebut yang akan menjadi dasar dari Nota Keuangan dan RUU APBN 2026** yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.

Di balik setiap pos anggaran APBN, tersembunyi **harapan jutaan rakyat**; Apakah anak mereka bisa terus sekolah? Apakah rakyat bisa berobat? Apakah ada lapangan kerja? bagaimana nasib petani, nelayan, buruh dan lain sebagainya.

Penyusunan dan pembahasan APBN bukanlah urusan teknis belaka—tetapi soal **keadilan dan keberpihakan.**

Menjadi harapan seluruh rakyat, bahwa RAPBN Tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden hari ini, dapat semakin **memudahkan hidup rakyat.**

Begitu juga harapan dari seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar APBN Tahun Anggaran 2026 dapat **ikut memperkuat pembangunan di daerah.**

Pidato Bapak Presiden hari ini, yang memuat Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026, kiranya dapat menjadi **sumber semangat dan optimisme nasional**, bahwa di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia memiliki **arah yang jelas, memiliki harapan yang cerah, semangat bergotong royong dan memiliki tekad untuk maju bersama-sama.**



Marilah kita, DPR RI, pada masa persidangan I ini, dapat menghasilkan Kebijakan-kebijakan Negara yang dapat **melindungi rakyat, mensejahterahkan rakyat, mencerdaskan rakyat**, dan ikut serta dalam **membangun tatanan dunia** yang lebih baik.

Kepada Anggota Dewan yang Terhormat:

“SELAMAT BEKERJA  
MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN  
RAKYAT”.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingan-Nya kepada kita semua.

**MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA!**

Dr. (H.C.) Puan Maharani

KETUA DPR RI